JURNAL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH DAN JAWA BARAT

EFFECT OF REVENUE REGIONAL, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND TO CAPITAL EXPENDITURES IN EAST JAVA, CENTRAL JAVA AND WEST JAVA

Oleh:

ASEP SETYO NUGROHO
12.1.02.01.0150

Dibimbing oleh :

1. **Dr. M. Anas, M.M., M. Si.**
2. **Suhardi, S.E., M.Pd**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Asep Setyo Nugroho
NPM	: 12.1.02.01.0150
Telepon/HP	: 085735515500
Alamat Surel (Email)	: asepsetyonugroho92@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Dan Jawa Barat
Fakultas – Program Studi	:FE – Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H. Achmad Dahlan No.76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiatisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 18 Januari 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis
Dr. M. Anas, M.M., M. Si. **NIDN. 0028106601**	**Suhardi, S.E., M.Pd.** **NIDN. 0701105804**	**Asep Setyo Nugroho** **NPM. 12.1.02.01.0150**

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH DAN JAWA BARAT

Asep Setyo Nugroho
12.1.02.01.0150
FE - Akuntansi
asepsetyonugroho92@gmail.com
Dr. M. Anas, M.M., M. Si. dan Suhardi, S.E., M.Pd
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Setiap daerah berusaha untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memaksimalkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki atas dasar inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Dengan ini berarti perubahan kualitas masyarakat dalam meningkatkan PAD perlu dilakukan beberapa dorongan salah satunya adalah dengan pembiayaan penyediaan fasilitas dan pelayanan publik. Selain itu peran dana perimbangan yaitu Dana lokai Umum dan Dana Alokasi Khusus cukup signifikan untuk membiayai belanja daerah, khususnya belanja yang menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik yaitu belanja modal. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang terdiri dari PAD, DAU dan DAK serta variabel terikat yaitu Belanja Modal.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat kepercayaan 5%. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi ringkasan kinerja tercatat di *www.djpk.depkeu.go.id*. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dn Jawa Barat selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampel yang kemudian didapatkan 11 daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangakan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa variabel PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

KATA KUNCI : PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif diberlakukan per Januari tahun 2001. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Menurut Undang- Undang tahun 2004 tersebut, otonmi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan

meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Setiap daerah berusaha untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memaksimalkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki atas dasar inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Dalam suatu wilayah atau daerah, terdapat beberapa macam potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah setempat, diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di indonesia memunculkan masalah baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal di masing-masing daerah yang tidak sama. Daerah dengan kesiapan fiskal yang cukup tinggi atau kaya akan potensi keuangan, akan memiliki sumber pendanaan daerah atau PAD yang semakin besar sehingga dapat memajukan daerahnya tersebut. hal ini tentunya berbanding terbalik dengan daerah yang memiliki kesiapan fiskal yang kurang atau potensi keuangan yang cukup kecil, sehingga daerah tersebut memiliki sumber pendanaan daerah atau PAD yang kecil yang mengakibatkan daerah tersebut kurang mampu untuk memajukan daerahnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan campur tangan pemerintah pusat dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Penerimaan daerah baik yang berasal dari daerah sendiri berupa PAD maupun dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, semakin besar penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar jumlah yang dapat dibelanjakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di daerah. Pemerintah daerah juga harus mampu untuk mengelola sumber-sumber dana yang diperoleh dengan baik yakni dengan cara mengarahkan pembelanjaannya pada kegiatan yang dapat berdampak pada kepentingan masyarakat, terutama pada sektor–sektor yang berkaitan erat dengan pelayanan kepentingan publik. Pembangunan daerah dalam sektor kepada publik secara tidak langsung akan semakin memberikan semangat kepada masyarakat untuk semakin giat dan berkerja keras dalam melakukan pekerjaannya karena telah ditunjang dengan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.Sama halnya dengan investor yang semakin tertarik kepada daerah

dengan adanya fasilitas memadai yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan ini berarti perubahan kualitas masyarakat dalam meningkatkan PAD perlu dilakukan beberapa dorongan salah satunya adalah dengan pembiayaan penyediaan fasilitas dan pelayanan publik. Selain itu peran dana perimbangan yaitu Dana lokai Umum dan Dana Alokasi Khusus cukup signifikan untuk membiayai belanja daerah, khususnya belanja yang menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik yaitu belanja modal.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dalam penelitian ini, peneliti memberikan judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH DAN JAWA BARAT"**

II. METODE

A. Identifikasi Variabel penelitian

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3).

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *ex-post-facto*. Penelitian *ex-post-facto* adalah penelitian sesudah kegiatan, ada pula yang menyebutkan *kausal-komparatif*. Penelitian *ex-post-facto* bertujuan mengekspos kejadian-kejadian yang sedang berlangsung.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Data penelitian laporan realisasi APBD diperoleh dari situs Direktorat Jendral Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri serta melalui data kepustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Waktu penelitian adalah tiga bulan terhitung mulai Juli 2016 sampai dengan Oktober 2016.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kabupaten dan Kota yang ada di di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebanyak 100 daerah. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, dimana sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten dan kota yang termasuk di dalam provinsi Jawa timur,jawa tengah dan

jawa barat yang terdaftar secara berturut-turut dalam realisasi angaran selama tahun penelitian yaitu sejumlah 11 daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi Kepustakaan.

F. Tehnik Analisis Data

1. Pengujian Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas
   b. Uji Multikolinearitas
   c. Uji Heteroskedastisitas
   d. Uji Autokorelasi
2. Pengujian Regresi Linier Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

3. Pengujian Hipotesis
   a. Uji t (secara Parsial)
   b. Uji F (secara Simultan)
4. Koefisien Determinasi

Model dan Teknik Analisis Data

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Analisis Data dan Interpretasi

1. Uji Asumsi Klasik
   a. Interpretasi Uji Normalitas
      1) Interpretasi Analisis Grafik

Untuk analisis grafik, menyatakan bahwa data telah terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh gambar yang sudah memenuhi dasar pengambilan keputusan, bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Interpretasi Analisis Statistik

Uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa data residual yang diolah adalah berdistribusi normal, hal ini dapat ditunjukkan pada tingkat signifikansi sebesar 0,627 angka ini lebih besar dari α = 0,05 sehingga hasil ini menunjukkan data berdistribusi normal.

b. Interpretasi Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas.Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa variabel PAD, DAU dan DAK memiliki nilai Tolerance

sebesar 0.928; 0.835;dan 0.894 yang lebih besar dari 0.10 dan VIF sebesar 1,077;1.197;,dan 1.119 yang lebihkecil dari 10. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas.

c. Interpretasi Uji Autokorelasi

Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji autokorelasi. Menurut Ghozali (2011:111) dengan melihat Durbin Watson dengan ketentuan du < dw < 4-du jika nilai dw terletak antara du dan 4 - du berarti bebas dari autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai DW sebesar 1.760. Nilai tersebut berada diantara nilai du yang bernilai 1.6647 dan nilai dari 4 - du = 4 - 1.6647 = 2.3353. maka uji autokorelasi tersebut adalah 1.6647 < 1,760 < 2.3353. Dengan demikian model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi.

d. Interpretasi Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar ditunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Interpretasi Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 14{,}050 + 1{,}308PAD + 1{,}151DAU - 0{,}225\,DAK + \varepsilon$$

Persamaan Regresi Linier berganda menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta = -14,050

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus = 0, maka Belanja Modal sebesar -14,050.

b. Koefisien X_1 = 1,308

Setiap penambahan 1 satuan Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi Dana Alokasi UmumdanDana Alokasi Khususbernilai nol, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 1,308. Namun sebaliknya,

jika Pendapatan Asli Daerah turun 1 satuan dengan asumsi Dana Alokasi UmumdanDana Alokasi Khususbernilai nol , maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar 1,308.

c. Koefisien X_2 = 1,151

Setiap penambahan 1 satuan Dana Alokasi Umumdengan asumsiPendapatan Asli DaerahdaanDana Alokasi Khususbernilai nol, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 1,151. Namun sebaliknya, jika Dana Alokasi Umumturun 1 satuan dengan asumsi Pendapatan Asli Daerahdan Dana Alokasi Khususbernilai nol, maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar 1,151.

d. Koefisien X_3 = -0,225

Setiap penambahan 1 satuan Dana Alokasi Khususdengan asumsi Pendapatan Asli Daerahdan Dana Alokasi Umumbernilai nol, maka akan menurunkanBelanja Modal sebesar 0,225. Namun sebaliknya. jika Dana Alokasi Khususturun 1 satuan dengan asumsi Pendapatan Asli DaerahdanDana Alokasi Umumbernilai nol, maka diprediksi akan menaikkanBelanja Modalsebesar 0,225.

3. Koefisisen Determinasi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0.412. dengan demikian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dapat menjelaskan Belanja Modal sebesar 41,2% dan sisanya yaitu 58,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian iniseperti.

4. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikansi secara parsial) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, secara idividual terhadap Belanja Modal (Y).

1) Pengujian Hipotesis 1

H_0 : b_1 = 0 Pendapatan Asli Daerah (CR) (X_1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (Y).

H_a : $b_1 \neq 0$ Pendapatan Asli Daerah (CR) (X_1)berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (CR) < 0.05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari pengujian parsial ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2) Pengujian Hipotesis 2

H_0 : $b_2 = 0$ Dana Alokasi Umum (X_2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal(Y).

H_a : $b_2 \neq 0$ Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan variabel Dana Alokasi Umumadalah 0.002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Dana Alokasi Umum<0.05 yang berarti $H_a$dterimadan H_0ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari pengujian parsial ini adalah Dana Alokasi Umumberpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3) Pengujian Hipotesis 3

H_0 : $b_3 = 0$ Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (Y).

H_a : $b_3 \neq 0$ Dana Alokasi Khusus(X3) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan variabel Dana Alokasi Khususadalah 0.607. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Dana Alokasi Khusus > 0.05 yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat

dikatakan bahwa hasil dari pengujian parsial ini adalah Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

H_0 : $b_{1,} = b_{2,} = b_{3,} = 0$ secara simultan tidak berpengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah.

Ha :$b_{1,} \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ secara simultan berpengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus< 0.05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari pengujian simultan ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi UmumdanDana Alokasi Khususberpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

B. PEMBAHASAN

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang baik serta diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah makaakan meningkatkan Belanja Modal dalam Daerah tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang benar maka akan semakin besar dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaandesentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan merupakan konsekuensi penyerahan kewenangan pusat terhadap daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau pelayanan lain. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Transfer ini merupakan dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusustidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Ketika suatu daerah mendapatkan aliran Dana Alokasi Khusus yang cukup banyak dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut lebih banyak melakukan belanja yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal itu akan membuat daerah tersebut bisa lebih berkembang dari pada sebelumnya. Seharusnya Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi dana DAK yang dicairkan oleh pemerintah pusat maka akan semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh daerah tersebut. Namun dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini bisa saja terjadi karena daerah – daerah yang memiliki DAK kurang mampu mengelola secara optimal sehingga DAK tidak mempengaruhi belanja modal.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini dapat di lihat dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil uji koefisien determinasi di dapatkan hasil 0,412. Dengan nilai koefisien determinasi (R Square) yang berarti bahwa Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketigavariabel independen sebesar 41,2%.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Laokasi Khusus naik maka Belanja Modal akan ikut naik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Arwati, Dini dan Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekoomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Universitas Widyatama. Bandung.

Ghozali, Imam2011. *Analisis Multivariat dengan Program SPSS,*Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Elex

Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja PEMDA : syudi kasus Kabupaten dan Koota di Jawa dan Bali, jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jkt. Salemba Humanika

Martini, dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi*

Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. STIE Nasional Banjarmasin. Banjarmasin.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standart

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, *tentang Dana Perimbangan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah. Depdagri. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Depdagri. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Santosa, Agus Budi dan Mohammad Ainur Rofiq. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010)*. Universitas Stikubank. Semarang.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013.*Metode Penelitian Manajemen*.Bandung:Alfabeta

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. tentang Hukum Pemerintah Daerah. Pustaka Bani Quraisy

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Tim Pustaka Yustisia

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*.Yogyakarta: C.V Andi Offset

www.djpk.depkeu.go.id